

SIARAN PERS

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN PT TASPEN “INTEGRASI APLIKASI SIMDA KEUANGAN DENGAN APLIKASI GAJI TASPEN”

Selasa, 15 Novemver 2016, Pukul 16.00 – 17.00 WIB Aula Gandhi, BPKP Pusat Jakarta

Jakarta – (15/11) Penandatanganan MoU tentang Integrasi Aplikasi Simda Keuangan dengan Aplikasi Gaji Taspem antara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dan Direktur Utama PT. Taspem Iqbal Latanro dilaksanakan Di Aula Gandhi Lantai 2 Gedung BPKP Pusat Jl Pramuka 33 Jakarta. Penandatanganan MoU ini menunjukkan keseriusan BPKP dalam berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara terus menerus dan konsisten untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Acara Penandatanganan MoU diawali dengan Pembacaan Naskah Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama PT Taspem dengan Kepala BPKP dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Operasi PT Taspem dengan Deputi Kepala BPKP Bidwas PPKD. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Direktur Utama PT Taspem dan sambutan Kepala BPKP.

Penandatanganan MoU tentang Integrasi Aplikasi Simda Keuangan dengan Aplikasi Gaji Taspem ini dihadiri pula oleh Deputi Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana, wakil dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, wakil dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Taspem Iqbal Latanro, Direktur Operasi PT Taspem Ermanza, Direktur Renbang TI PT Taspem Faisal Rahman, Direktur Umum PT Taspem Bagus Rumbogo dan Pejabat di lingkungan PT Taspem serta pejabat Eselon I dan Eselon II BPKP.

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 BPKP telah diberi mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Selain itu Presiden juga telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Regulasi tersebut sangatlah strategis dalam rangka mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara/Daerah dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menuntut komitmen kuat dari semua pihak.

Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPKP telah berperan aktif dalam melaksanakan pendampingan maupun penyediaan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akuntansi akrual yang hingga saat ini telah digunakan pada 371 Pemerintah Daerah.

Terkait dengan keuangan Pemerintah Daerah, PT. Taspen telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi SIMGAJI TASPEN pada Pemerintah Daerah, yang dinilai sangat mendukung kualitas sumber data untuk diproses dalam SIMDA Keuangan, sehingga Kepala BPKP menyambut baik ditandatanganinya MoU ini. “Melalui kerjasama ini akan menghasilkan sinergitas yang efektif untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Ardan.

Sinergi Aplikasi SIMGAJI TASPEN dan Aplikasi SIMDA Keuangan BPKP berupa integrasi data untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kemudahan kepada Pemerintah daerah dalam pembuatan SPP Belanja gaji ke dalam Aplikasi SIMDA Keuangan BPKP. Selain itu sinergi tersebut dapat menjamin keakuratan data pembayaran belanja gaji dan pembayaran iuran Dana Pensiun/Tabungan Hari Tua Pegawai negeri/ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga kesalahan perhitungan dapat diminimalisir.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama, untuk mendorong percepatan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik. “Koordinasi dan sinergi harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka implementasi integrasi tersebut pada seluruh Pemerintah Daerah,” jelas Ardan. Selain itu, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan bangsa dan negara ini, dengan berdasarkan pada komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP, Jl.Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Telp/Fax: 021-8584985, situs web: www.bpkp.go.id, surel: humas@bpkp.go.id CP: Nuri Sujarwati, 081281129932;Asikin 081310227861, Tri Endang Mudiastuti, 081218472336; Harry Bowo, 08159918047; dan Sudarsari Sjamsoe, 08164846224.